



RENSTRA TAHUN 2025-2029



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PENANGGULANGAN KEBAKARAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**





PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 44. TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, berdasarkan ketentuan Pasal 120 Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Rancangan Akhir Perangkat Daerah disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau untuk di verifikasi;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, sistematika dan substansi Rencana Strategis Perangkat Daerah telah sesuai dengan ketentuan dan berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 70);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (Lima) tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 adalah Rencana Strategis mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 4

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 September 2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,


ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025 NOMOR 1064

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, dapat diselesaikan dengan baik, sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), sehingga untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan maka penyusunan Rencana Strategis Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau berpedoman pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 – 2029, Renstra Kementerian Dalam Negeri RI Tahun 2025 – 2029, serta Renstra Kabupaten/Kota.

Fungsi Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Riau dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah :

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang realistis, konsisten dengan visi, misi dan tupoksi Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Perangkat Daerah dalam implementasinya.
2. Menerjemahkan arah dan kebijakan pemerintah daerah terkait perkembangan pelayanan Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat.
3. Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau.
4. Merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan.
5. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau

Renstra ini setiap tahunnya akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah, sehingga terjadi sinkronisasi program dan kegiatan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah.

Kami sangat menyadari bahwa Rencana Strategis 2025-2029 ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan Rencana Strategis ini sehingga dapat dijadikan pedoman pencapaian tujuan dan sasaran Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran lima tahun ke depan.

Akhir kata, semoga penyusunan Rencana Strategis ini bermanfaat bagi pembangunan di bidang Ketenteraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, September 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



MARTIN L MAROMON, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670306 199703 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-8
1.4. Sistematika Penulisan	I-9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN.....	II-1
2.1. Gambaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	II-1
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	II-25
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	III-1
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Satuan Polisi PP dan Penanggulangan Kabakaran Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.....	III-1
3.2. Strategi.....	III-4
3.3. Arah Kebijakan	III-5
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV-1
4.1. Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan	IV-1
4.2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	IV-64
4.3. Indikator Kinerja Kunci.....	IV-65
BAB V PENUTUP	V-1
5.1. Pedoman Transisi	V-1
5.2. Kaidah Pelaksanaan	V-1
5.3. Pedoman Pengendalaian dan evaluasi.....	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daftar Barang Milik daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau.....	II-10
Tabel 2.2	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	II-27
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Tahun 2025-2030	III-3
Tabel 3.2	Penahapan Pembangunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Tahun 2025-2029.....	III-5
Tabel 3.3	Perumusan Arah Kebijakan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Tahun 2025-2029	III-8
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/ kegiatan/ Subkegiatan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Tahun 2025-2030 Provinsi Kepulauan Riau	IV-5
Tabel 4.2	Rencana Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Tahun 2025-2030 Provinsi Kepulauan Riau	IV-35
Tabel 4.3	Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV-62
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Tahun 2025-2030	IV-64
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Urusan ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025-2030	IV-65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	I-4
Gambar 2.1	Pegawai Satpol PP Berdasarkan Tingkat Pendidikan	II-9
Gambar 2.2	Perkembangan Kasus Pelanggaran Trantibum di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024	II-13
Gambar 2.3	Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024	II-14
Gambar 2.4	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024	II-15
Gambar 2.5	Jumlah Patroli yang Dilaksanakan Oleh Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024 (kali)	II-16
Gambar 2.6	Pengamanan Event pemerintahan dan Pengamanan Unjuk Rasa Oleh Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024	II-17
Gambar 2.7	Jumlah Anggota Linmas di Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II-18
Gambar 2.8	Persentase Penyelesaian Dokumenb Kebakaran dan/atau Tindak Lanjutnya di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022- 2024	II-19
Gambar 2.9	Perkembangan Nilai SAKIP dan Nilai SKM Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024	II-20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang wajib disusun oleh setiap perangkat daerah sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama periode lima tahun. Penyusunan Renstra ini diamanatkan dalam berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur tentang kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam aspek ketertiban umum dan penanggulangan kebakaran. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 juga mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, termasuk penyusunan Renstra perangkat daerah.

Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran strategis dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan kondusif. Oleh karena itu, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran disusun untuk mengarahkan kebijakan, strategi, dan program kerja yang akan dilakukan dalam lima tahun ke depan, guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran memiliki fungsi utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Pertama, Renstra berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan yang selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Kedua, dokumen ini menjadi alat ukur dalam mengevaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran dalam menjalankan tugasnya. Ketiga, Renstra membantu dalam pengalokasian sumber daya secara efektif dan efisien guna meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pendekatan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, termasuk Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran terdiri dari pendekatan yang berorientasi pada substansi renstra, dan yang kedua pendekatan yang berorientasi pada proses penyusunan. Pertama adalah pendekatan-pendekatan yang berorientasi pada substansi meliputi: pendekatan Holistik-Tematik,

pendekatan integratif dan pendekatan spasial. Tematik, holistik, integratif, dan spasial merupakan penjabaran tema Prioritas Pembangunan ke dalam perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah. Kedua pendekatan berorientasi proses, yakni meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.

Proses penyusunan Renstra dilakukan melalui beberapa tahapan penting. Tahapan-tahapan tersebut meliputi:

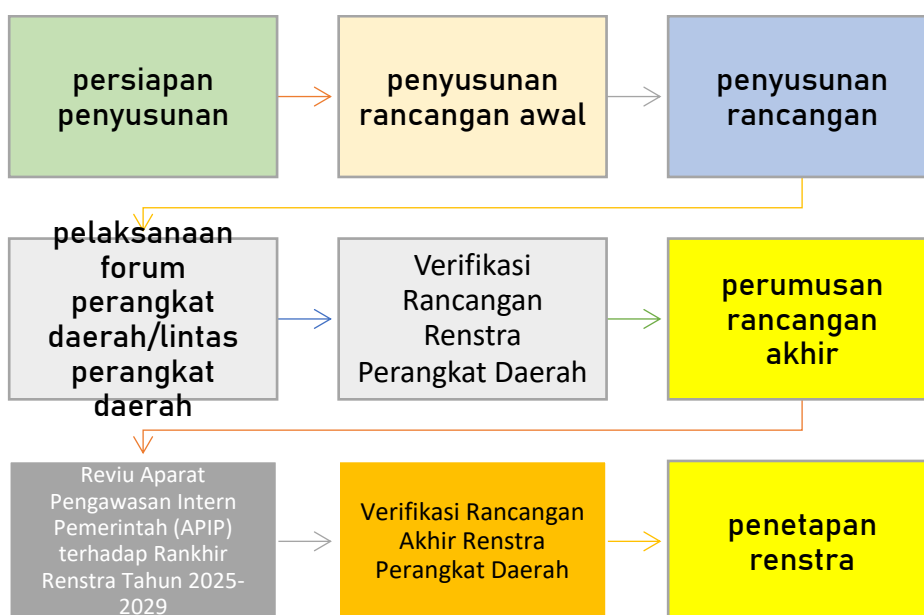
1. **Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.** Pada tahap ini dilakukan Pelaksanaan orientasi penyusunan Renstra Perangkat Daerah; Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah; Analisis data evaluasi hasil pembangunan 5 (lima) tahun terakhir; Inventaris data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lainnya; dan Hal-hal yang diperlukan dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
2. **Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.** Pada tahap ini dilakukan penyusunan Pendahuluan; Gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis perangkat daerah; Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan; Program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan Penutup.
3. **Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.** Pada tahap ini Bappeda menyampaikan surat edaran Kepala Daerah kepada kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan Ranwal RPJMD. Selanjutnya Perangkat Daerah melakukan Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang merupakan proses penyempurnaan Ranwal Renstra menjadi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.
4. **Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.** Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Bappeda dengan pendekatan tematik yang melibatkan Perangkat Daerah terkait. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan untuk menyepakati keluaran (output) utama Renstra Perangkat Daerah, termasuk keluaran (output) untuk melaksanakan program kepala daerah, dan keterhubungan keluaran (output antar-Renstra Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja hasil (outcome) tematik pembangunan. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan Hasil Forum Perangkat

Daerah/Lintas Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dirumuskan dalam berita acara kesepakatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

5. Verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Pada tahap ini Perangkat daerah melakukan penyempurnaan Ranwal Renstra Perangkat Daerah menjadi Rancangan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan berita acara kesepakatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Setelah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, kepala Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi. Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan mengakomodasi hasil Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Perangkat daerah menyempurnakan Rancangan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan hasil verifikasi Bappeda. Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.
6. Perumusan Rankhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Perumusan Rankhir Renstra merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi Rankhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Perda tentang RPJMD Tahun 2025-2029. Perumusan Rankhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program/kegiatan/ sub kegiatan PD berdasarkan strategi, arah kebijakan, program prioritas yang ditetapkan dalam Perda tentang RPJMD.
7. Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rankhir Renstra Tahun 2025-2029. Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 direviu oleh APIP. Hasil Reviu APIP terhadap Rankhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disampaikan kepada Perangkat Daerah; dan Perangkat Daerah menyempurnakan Rankhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berdasarkan Hasil Reviu APIP.
8. Verifikasi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah. Pada tahap ini Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan berdasarkan Hasil Reviu APIP kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi sebelum ditetapkan; Verifikasi harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program

prioritas, program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah sudah selaras dengan Perda RPJMD Tahun 2025-2029. Apabila hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) tersebut di atas, Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

9. Penetapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Pada tahap ini, Rankhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah. Bappeda menyampaikan Rankhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Penetapan Perkada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan.



Gambar 1. Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Dalam penyusunannya, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029. RPJMD merupakan dokumen perencanaan daerah yang memuat visi dan misi kepala daerah terpilih, sehingga Renstra perangkat daerah harus

mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Dengan demikian, program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran harus mampu berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja utama yang telah dirumuskan dalam RPJMD.

Selain RPJMD, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran juga harus mempertimbangkan kebijakan yang tertuang dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penanggulangan kebakaran.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran tahun 2025-2029 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang lebih operasional. Renja merupakan turunan dari Renstra yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang lebih spesifik serta disesuaikan dengan anggaran yang tersedia setiap tahunnya. Dengan demikian, implementasi Renstra dapat berjalan secara sistematis dan terukur melalui Renja tahunan.

Renstra yang disusun dengan baik akan meningkatkan kinerja Satpol PP dan Damkar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Keberadaan Renstra memungkinkan adanya perencanaan yang lebih matang dan terstruktur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik dalam aspek ketertiban umum maupun penanggulangan kebakaran.

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 merupakan langkah strategis dalam memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran dalam menciptakan kondisi yang tertib, aman, dan sejahtera. Dengan adanya Renstra yang komprehensif dan selaras dengan berbagai kebijakan terkait, diharapkan Satpol PP dan Damkar dapat berkontribusi secara optimal dalam pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundangan yang menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

- Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Provinsi

- Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 39);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 70);
 25. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Tahun 2025-2029 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran.

Tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Tahun 2025-2029 yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan

perlindungan masyarakat selama kurun waktu tahun 2025-2030 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran dalam mendukung Visi dan Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau.

- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat kurun waktu tahun 2025-2030 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2026-2030.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Panjang Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Sistematika muatan masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Tahun 2025-2029.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan terkait dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah yang dilengkapi dengan indikator kinerja beserta target yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran dalam kurun waktu 2025-2030. Selain itu juga digambarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan untuk mendorong pencapaian

target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran.

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang Rencana Program, Kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran dari tahun 2026 sampai 2030 beserta target kinerjanya. Dalam bab ini juga ditampilkan target kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU), dan juga Indikator Kinerja Kunci urusan bidang sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kepulauan Riau.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

2.1. Gambaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

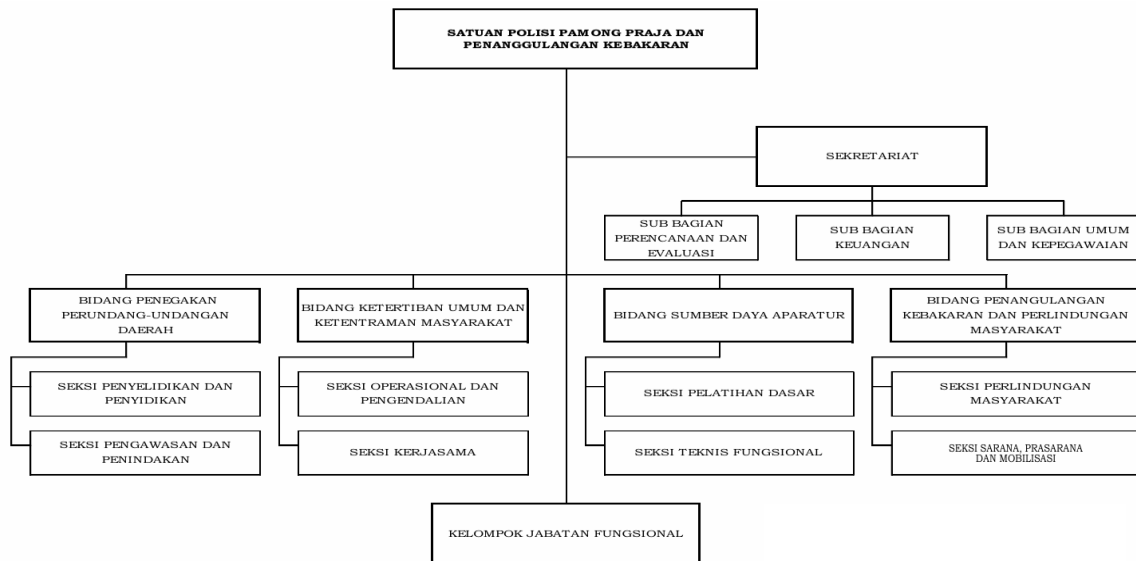
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Secara rinci struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran diatur melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, struktur organisasi Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri dari:
 1. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 2. Seksi Pengawasan dan Penindakan;
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri dari:
 1. Seksi Operasional dan Pengendalian;
 2. Seksi Kerjasama;
- e. Bidang Sumberdaya Aparatur, terdiri dari:
 1. Seksi Pelatihan Dasar;
 2. Seksi Teknis Fungsional;
- f. Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
 1. Seksi Perlindungan Masyarakat;
 2. Seksi Sarana, Prasarana dan Mobilisasi;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran adalah sebagai berikut:

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**



Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Tipe A dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan dijabarkan di dalam dokumen Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Penanggulangan Kebakaran sesuai peraturan gubernur tersebut adalah sebagai berikut:

a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Sekretariat, Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur dan Penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi

Dalam menyelenggarakan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Penegakan Perundang undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur dan Penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur dan Penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur dan Penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur dan Penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
- e. penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi; pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
- f. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat memiliki tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan Bidang-Bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait keuangan;
- b. penyusunan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait umum dan kepegawaian;
- c. pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- d. penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
- e. penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan;

Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait

Pembinaan dan Penyuluhan, pengawasan dan penindakan, penyelidikan dan penyidikan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pembinaan dan Penyuluhan, pengawasan dan penindakan, penyelidikan dan penyidikan.
- b. penghimpunan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan untuk melaksanakan pembinaan dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- d. pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur dan badan hukum secara persuasif di wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang perlu penegakan hukum/mengandung sanksi;
- f. penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah se-Provinsi Kepulauan Riau;
- g. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah kepada masyarakat, aparatur dan badan hukum se-Provinsi Kepulauan Riau;
- h. penyiapan bahan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemahaman serta kepatuhan penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- i. pelaksanaan koordinasi Peningkatan Efektifitas dalam Pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah se-Provinsi Kepulauan Riau;
- j. pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi dan Temu Konsultasi (FORKOMKON) terkait Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- k. pelaksanaan kegiatan Kodifikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- l. pelaksanaan Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan Daerah bagi anggota Satpol PP Provinsi Kepri;

- m. penyiapan bahan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan pembinaan dan penyuluhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- n. penyiapan bahan dan menyusun laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah secara berkala;
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah terdiri dari Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, dan Seksi Pengawasan dan Penindakan.

d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Operasional dan Pengendalian, Kerjasama dan Deteksi Dini.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut point 2, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai rincian fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Operasional dan Pengendalian, Kerjasama dan Deteksi Dini.
- b. pelaksanaan sinkronisasi dengan instansi terkait Sub Koordinator Deteksi Dini dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi program;
- c. pelaksanaan mediasi dan komunikasi Deteksi Dini dalam rangka Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- d. pelaksanaan monitoring deteksi daerah rawan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat terdiri dari Seksi Operasional dan Pengendalian, dan Seksi Kerja Sama.

e. Bidang Sumber Daya Aparatur

Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pelatihan Dasar, Teknis Fungsional, Pembinaan dan Penindakan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai rincian fungsi sebagai berikut;

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan

koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pelatihan Dasar, Teknis Fungsional, Pembinaan dan Penindakan;

- b. pelaksanaan monitoring dalam aspek pembinaan dan penindakan terhadap pegawai di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. pelaksanaan sinkronisasi dengan bidang terkait dalam pembinaan dan penindakan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri dari Seksi Pelatihan Dasar, dan Seksi Teknis Fungsional.

f. Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat

Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Satuan Perlindungan Masyarakat, Sarana, Prasarana dan Mobilisasi, Penanggulangan Kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat mempunyai rincian fungsi sebagai berikut;

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Satuan Perlindungan Masyarakat, Sarana, Prasarana dan Mobilisasi, Penanggulangan Kebakaran.
- b. pelaksanaan pendataan dan pemantauan meliputi ruang lingkup kebakaran hutan, Gedung perkantoran dan rumah masyarakat di Kabupaten/Kota Se – Provinsi Kepulauan Riau;
- c. pelaksanaan komunikasi, bimbingan dan penyuluhan penguatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari Seksi Perlindungan Masyarakat, dan Seksi Sarana, Prasarana dan Mobilisasi.

g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2. Sumber Daya

1. Sumberdaya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) di Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau memegang peranan strategis dalam menjaga ketertiban umum serta memberikan perlindungan terhadap risiko kebakaran di wilayah yang memiliki karakteristik kepulauan. Berdasarkan data terbaru, jumlah personel didominasi oleh laki-laki dengan total 188 orang, sementara perempuan hanya berjumlah 28 orang. Ketimpangan gender ini mencerminkan bahwa peran perempuan dalam sektor ini masih terbatas, yang kemungkinan disebabkan oleh persepsi terhadap beban kerja fisik dan risiko tinggi dalam tugas-tugas penegakan perda dan penanggulangan kebakaran. Namun demikian, keberadaan personel perempuan tetap penting dalam konteks pelayanan yang inklusif dan pendekatan humanis terhadap masyarakat.



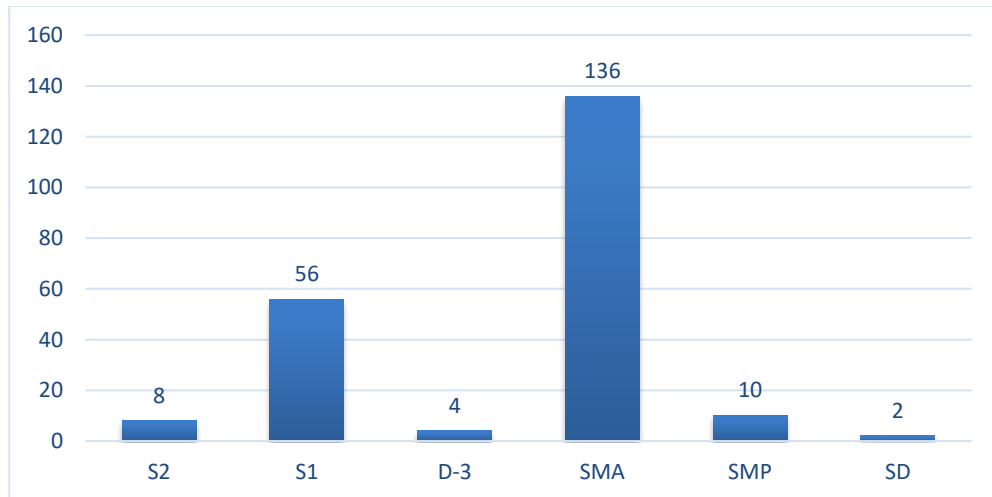
Dari sisi kuantitas, jumlah SDM yang ada relatif belum proporsional jika dibandingkan dengan tantangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang tersebar. Oleh karena itu, penguatan kapasitas, distribusi personel yang merata antar wilayah, serta peningkatan kompetensi melalui pelatihan berkala menjadi hal mendesak dalam meningkatkan efektivitas dan profesionalisme kinerja Satpol PP dan penanggulangan kebakaran di Provinsi Kepulauan Riau.



Berdasarkan data jumlah personel di Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau, komposisi sumber daya manusia menunjukkan dominasi tenaga non-PNS. Dari total 216 personel, hanya 68 orang (sekitar 31,5%) yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), sementara sisanya, sebanyak 148 orang (sekitar 68,5%), berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Proporsi ini mencerminkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap tenaga PPPK dalam

menjalankan tugas-tugas penegakan perda, ketertiban umum, serta penanggulangan kebakaran di tingkat provinsi. Hal ini memiliki implikasi terhadap keberlanjutan dan stabilitas organisasi, mengingat PPPK memiliki keterbatasan dalam hal masa kerja dan jenjang karier dibandingkan PNS. Di sisi lain, kondisi ini juga menunjukkan adanya kebijakan strategis pemerintah daerah dalam memanfaatkan skema PPPK untuk memenuhi kebutuhan SDM secara lebih fleksibel dan efisien dalam jangka pendek hingga menengah. Namun, ke depan diperlukan penguatan kapasitas dan integrasi antarstatus kepegawaian agar efektivitas layanan tetap terjaga.

Sumber daya manusia (SDM) di Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan komposisi yang didominasi oleh lulusan pendidikan menengah atas. Dari total 216 personel, sebanyak 136 orang (62,96%) merupakan lulusan SMA, diikuti oleh 56 orang (25,93%) lulusan S-1, dan sisanya tersebar pada jenjang pendidikan lainnya seperti S-2 sebanyak 8 orang (3,70%), D-3 sebanyak 4 orang (1,85%), SMP sebanyak 10 orang (4,63%), dan SD sebanyak 2 orang (0,93%). Komposisi ini mencerminkan bahwa mayoritas personel berasal dari latar belakang pendidikan menengah, sementara proporsi SDM dengan pendidikan tinggi (S-1 dan S-2) baru mencapai sekitar 29,63%. Rendahnya jumlah personel dengan kualifikasi pendidikan tinggi dapat menjadi tantangan tersendiri dalam penguatan kapasitas kelembagaan, khususnya dalam hal perencanaan, manajemen, dan pelayanan publik berbasis pendekatan profesional. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas melalui pendidikan lanjutan dan pelatihan teknis menjadi penting untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran secara optimal di Provinsi Kepulauan Riau.



Gambar 2.1 Pegawai Satpol PP Berdasarkan Tingkat Pendidikan

2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Ketersediaan sarana dan prasarana di Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau secara umum cukup beragam dan mencerminkan upaya institusi dalam mendukung pelaksanaan tugasnya. Beberapa jenis aset dengan jumlah signifikan mencerminkan fungsi administratif dan operasional yang berjalan aktif, seperti alat rumah tangga lainnya (366 unit), meubeler (215 unit), personal komputer (101 unit), alat kantor lainnya (101 unit), dan alat komunikasi telepon (88 unit). Ini menunjukkan bahwa aspek penunjang kerja administrasi dan komunikasi internal telah difasilitasi dengan relatif baik.

Dari sisi kendaraan operasional, jumlah yang tersedia masih terbatas untuk cakupan wilayah dan potensi kedaruratan yang dihadapi. Hanya terdapat 5 kendaraan dinas perorangan, 3 kendaraan angkutan barang, 18 sepeda motor, dan 1 alat angkut apung bermotor. Keterbatasan ini dapat berdampak pada kecepatan mobilisasi personel, khususnya dalam kondisi darurat atau untuk patroli rutin di wilayah dengan geografi kepulauan. Selain itu, perlengkapan teknis pemadam dan keselamatan seperti pompa air, alat keamanan, dan alat pelindung juga tersedia dalam jumlah terbatas, masing-masing di bawah 25 unit, padahal peralatan ini esensial dalam mendukung fungsi penanggulangan kebakaran dan perlindungan masyarakat.

Adanya 42 alat kedokteran umum dan 10 alat kesehatan olahraga mencerminkan perhatian terhadap aspek kesehatan internal pegawai, sementara keberadaan peralatan studio audio-visual dan komputer jaringan menandakan kesiapan lembaga dalam mendukung komunikasi publik atau dokumentasi kegiatan. Akan tetapi, jumlah bangunan

pendukung seperti kantor (2 unit), pos jaga (3 unit), dan garasi/pool (1 unit) masih sangat minim dibandingkan dengan kebutuhan penyebaran dan penyimpanan aset secara optimal.

Secara keseluruhan, meskipun sarana prasarana penunjang administratif sudah cukup lengkap, terdapat kebutuhan peningkatan pada sarana operasional lapangan, kendaraan dinas, serta fasilitas fisik pendukung untuk menjamin efektivitas kerja Satpol PP dan Damkar di wilayah Kepulauan Riau. Pemenuhan secara bertahap terhadap kekurangan ini penting untuk memperkuat kapasitas responsif dan profesionalisme lembaga.

Tabel 2.1 Daftar Barang Milik Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau

No	Jenis Aset	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	Pompa Air	1	1	0
2	Kendaraan Dinas Perorangan	5	5	0
3	Kendaraan Bermotor Angkutan barang	3	3	0
4	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	18	18	0
5	Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Penumpang	1	1	0
6	Peralatan Bengkel Khusus Peladam	1	1	0
7	Alat Ukur Universal	1	1	0
8	Alat Pengukur Keadaan Alam	1	1	0
9	Mesin Ketik	1	1	0
10	Alat Reproduksi (Penggandaan)	1	1	0
11	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	26	26	0
12	Alat Kantor Lainnya	101	101	0
13	Meubeler	215	215	0
14	Alat Pembersih	4	4	0
15	Alat Pendingin	48	48	0
16	Alat Dapur	4	4	0
17	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	366	366	0
18	Meja Kerja Pejabat	26	26	0
19	Meja Rapat Pejabat	2	2	0
20	Kursi Kerja Pejabat	7	7	0
21	Kursi Rapat Pejabat	1	1	0
22	Kursi Tamu Di Ruangn Pejabat	1	1	0

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

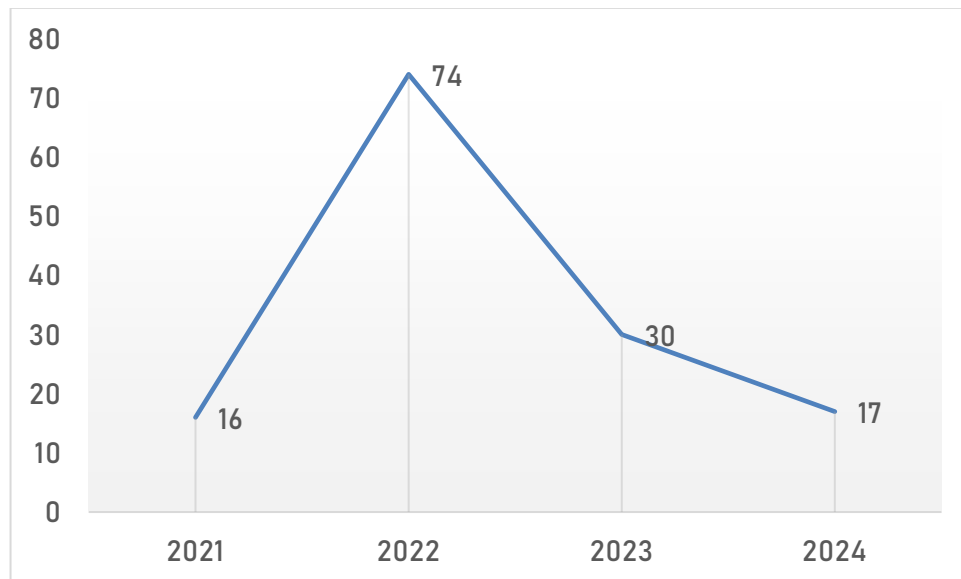
No	Jenis Aset	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
23	Lemari Dan Arsip Pejabat	9	9	0
24	Peralatan Studio Audio	2	2	0
25	Peralatan Studio Video Dan Film	10	10	0
26	Alat Komunikasi Telephone	88	88	0
27	Alat Komunikasi Radio Vhf	35	35	0
28	Alat Komunikasi Radio Uhf	19	19	0
29	Peralatan Antena Uhf	1	1	0
30	Peralatan Antena Shf/Parabola	3	3	0
31	Sumber Tenaga	1	1	0
32	Alat Kedokteran Umum	42	42	0
33	Alat Kesehatan Olah Raga	10	10	0
34	Alat Keamanan	23	23	0
35	Non Senjata Api	1	1	0
36	Alat Nuklir, Biologi Dan Kimia (Sepatu Pelindung)	3	3	0
37	Personal Komputer	101	101	0
38	Peralatan Personal Komputer	78	78	0
39	Peralatan Jaringan	14	14	0
40	Sumur Lainnya	1	1	0
41	Baju Pengaman	3	3	0
42	Alat Pelindung Lainnya	2	2	0
43	Alat Pendukung Pencarian	9	9	0
44	Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	3	3	0
45	Signal	2	2	0
46	Peralatan Permainan	1	1	0
47	Bangunan Gedung Kantor	2	2	0
48	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	3	3	0
49	Bangunan Gedung Garasi/Pool	1	1	0
50	Bangunan Parkir	1	1	0

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran memiliki peran strategis dalam menciptakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta perlindungan terhadap risiko kebakaran dan bencana lainnya. Unit kerja ini bertugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan, khususnya di bidang sekretariat, penegakan peraturan daerah, pembinaan sumber daya

aparatur, serta penanggulangan kebakaran dan perlindungan masyarakat. Kinerja layanan Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran diwujudkan melalui serangkaian kegiatan yang meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, hingga pengelolaan administrasi dan akuntabilitas kinerja instansi. Selain itu, satuan ini juga berperan dalam penerapan sistem pengendalian intern, pelaksanaan reformasi birokrasi, serta penyampaian laporan kinerja secara berkala kepada Gubernur. Keseluruhan fungsi tersebut merupakan manifestasi dari komitmen pemerintah provinsi dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keselamatan publik secara berkelanjutan dan profesional.

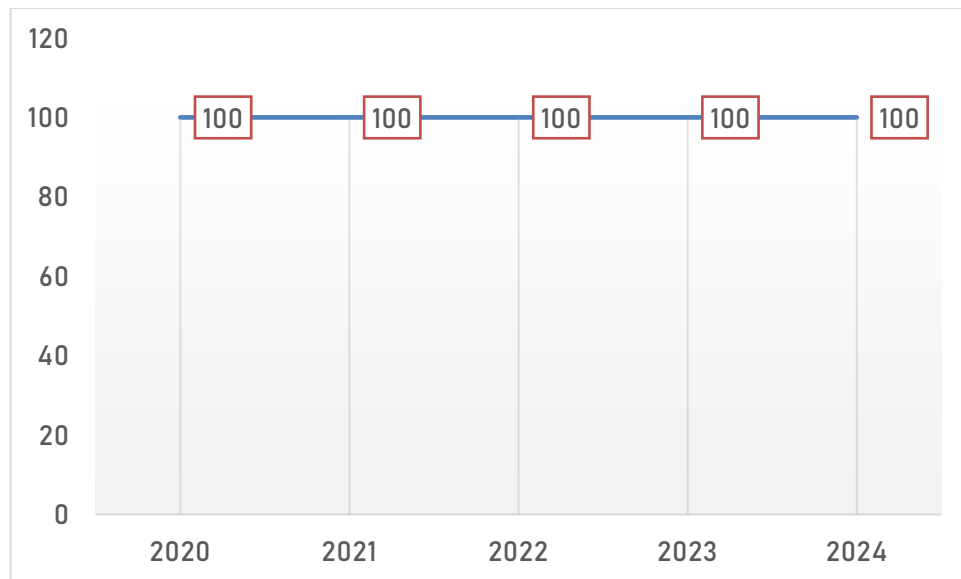
Data jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) di Provinsi Kepulauan Riau selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2020, tercatat nihil kasus gangguan trantibum, mencerminkan situasi yang sangat kondusif. Namun, pada tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi 16 kasus, yang kemudian melonjak tajam pada tahun 2022 hingga mencapai 74 kasus. Lonjakan ini mengindikasikan kemungkinan adanya ketegangan sosial, meningkatnya aktivitas masyarakat pasca-pandemi, atau lemahnya kontrol pada tahun tersebut. Tahun 2023 menunjukkan penurunan signifikan menjadi 30 kasus, dan tren positif ini berlanjut pada tahun 2024 dengan penurunan lebih lanjut menjadi 17 kasus. Penurunan jumlah kasus dalam dua tahun terakhir menunjukkan keberhasilan intervensi Satpol PP dan strategi pemulihan keamanan yang diterapkan secara efektif. Meski tren menunjukkan perbaikan, penting untuk terus memperkuat upaya pencegahan dan pengawasan, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban umum secara berkelanjutan.



Gambar 2.2 Perkembangan Kasus Pelanggaran Trantibum di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024

Sumber: Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Tahun 2025

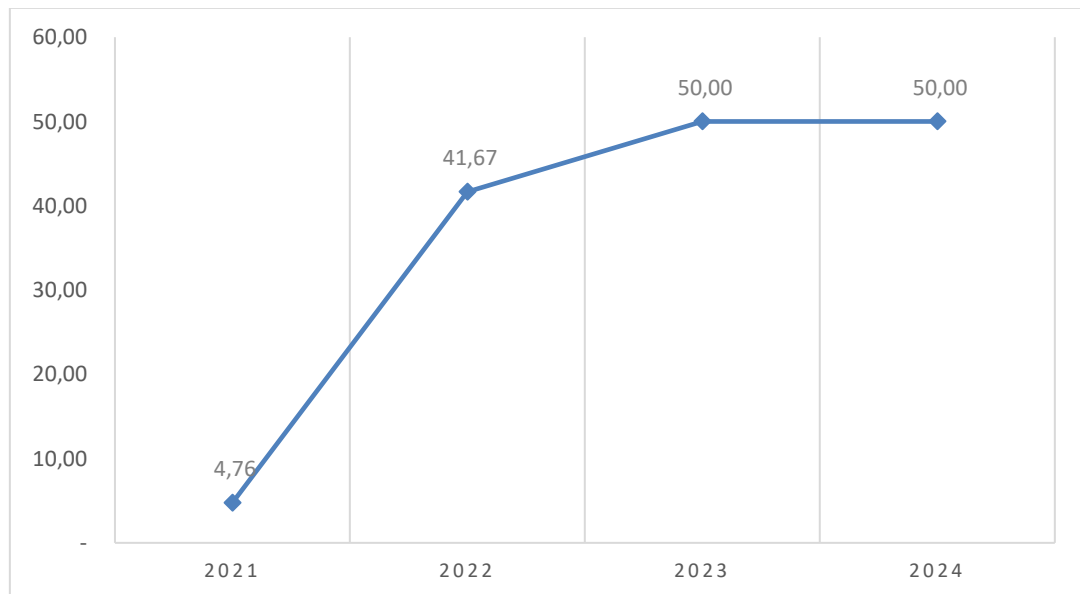
Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran dalam menangani gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan hasil yang sangat optimal. Berdasarkan indikator persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan, capaian selalu berada pada tingkat 100% setiap tahunnya. Artinya, seluruh kasus gangguan trantibum yang terjadi dalam lima tahun terakhir berhasil ditangani secara tuntas oleh satuan ini. Konsistensi capaian ini mencerminkan efektivitas sistem deteksi dini, respons cepat, dan koordinasi lintas sektor yang diterapkan oleh Satpol PP dan unit pemadam kebakaran. Selain itu, capaian tersebut juga menjadi bukti keberhasilan dalam membangun profesionalisme aparatur serta memperkuat peran pelayanan publik di bidang ketertiban umum. Meski capaian 100% mencerminkan kinerja yang sangat tinggi, ke depan tetap diperlukan penguatan aspek preventif dan partisipatif dari masyarakat guna menjaga keberlanjutan kondisi tertib dan aman di lingkungan sosial.



Gambar 2.3 Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

Sumber: Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Tahun 2025

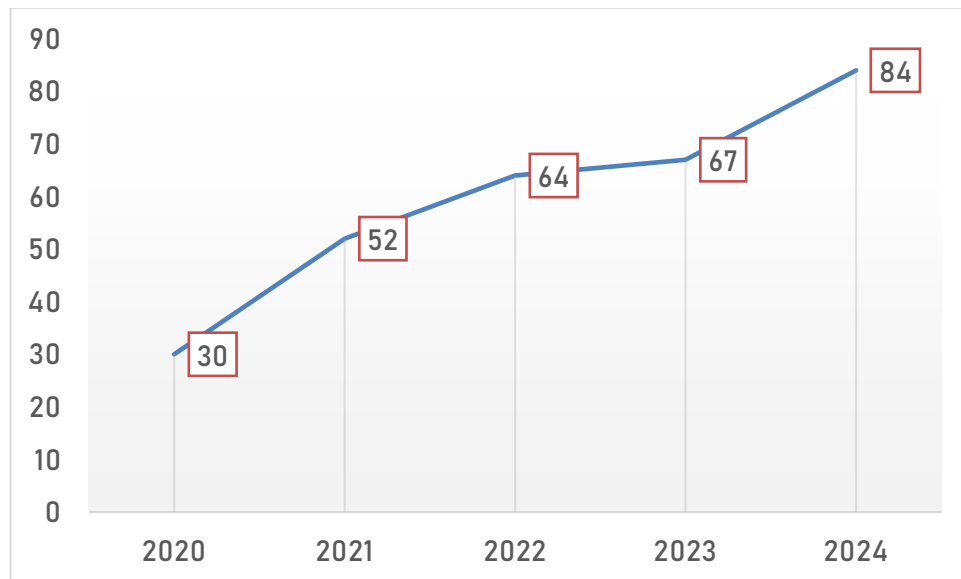
Realisasi penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di Provinsi Kepulauan Riau selama periode 2021 hingga 2024 menunjukkan tren yang tidak stabil, namun dengan kecenderungan membaik pada akhir periode. Pada tahun 2021, persentase penegakan Perda dan Perkada tercatat sebesar 4,76%. Namun, pada tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 41,67%, kemudian pada tahun 2023 dan 2024 menjadi sebesar 50%, menandakan adanya peningkatan kapasitas dan keseriusan dalam penegakan regulasi daerah. Hal ini mencerminkan peningkatan efektivitas peran Satpol PP dalam menjalankan fungsi penegakan hukum daerah, namun demikian masih perlu penguatan kelembagaan dan keberlanjutan dalam penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.



Gambar 2.4 Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

Sumber: Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Tahun 2025

Pelaksanaan patroli oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan signifikan. Pada tahun 2020 tercatat 30 kegiatan patroli, yang meningkat menjadi 52 pada tahun 2021. Kegiatan ini terus meningkat menjadi 64 kali pada 2022, 67 kali pada 2023, dan mencapai 84 kali pada tahun 2024. Peningkatan jumlah patroli ini mencerminkan komitmen Satpol PP dalam memperkuat kehadiran aparat di lapangan untuk mencegah dan menangani gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum), serta menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Frekuensi patroli yang semakin tinggi turut berkontribusi terhadap meningkatnya efektivitas penanganan kasus trantibum dan pelaksanaan penegakan hukum daerah. Hal ini menunjukkan bahwa strategi preventif melalui patroli rutin terbukti efektif dalam menciptakan rasa aman, menekan potensi pelanggaran, dan memperkuat penegakan regulasi secara langsung di lapangan. Ke depan, intensifikasi patroli perlu disertai dengan inovasi teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia guna menjaga stabilitas ketertiban umum secara berkelanjutan.



Gambar 2.5 Jumlah Patroli yang Dilaksanakan Oleh Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024 (kali)

Sumber: Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Tahun 2025

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau dalam aspek pengamanan selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan intensitas dan komitmen tinggi dalam menjaga ketertiban dan kelancaran aktivitas pemerintahan serta dinamika sosial masyarakat. Dalam hal pengamanan event pemerintah, terdapat peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2020 hanya terdapat 43 kegiatan pengamanan, namun meningkat drastis menjadi 201 kali pada tahun 2022, dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan 281 kegiatan. Meskipun sedikit menurun menjadi 245 pada tahun 2024, angka ini tetap jauh lebih tinggi dibanding awal periode. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa Satpol PP semakin dilibatkan secara aktif dalam berbagai agenda pemerintah, sekaligus mencerminkan meningkatnya kepercayaan terhadap kapasitas institusi ini dalam menciptakan rasa aman di ruang publik pemerintahan.

Sementara itu, pelaksanaan pengamanan terhadap aksi unjuk rasa menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan menurun. Jumlah kegiatan pengamanan unjuk rasa tercatat sebanyak 16 kali pada tahun 2020 dan 2021, kemudian sedikit meningkat menjadi 19 kali pada tahun 2022, namun menurun kembali menjadi 17 kali di tahun 2023, dan 11 kali pada tahun 2024. Penurunan ini bisa dimaknai dari dua sisi: pertama, potensi menurunnya intensitas aksi unjuk rasa di masyarakat; kedua, kemungkinan adanya pendekatan preventif dan mediasi yang lebih baik dari pihak pemerintah daerah dan aparat, termasuk Satpol PP. Penurunan jumlah ini,

bila dibarengi dengan tetap terjaganya stabilitas sosial, merupakan indikator positif bahwa upaya menjaga ketenteraman publik melalui pendekatan humanis dan komunikatif mulai menunjukkan hasil.

Secara keseluruhan, data ini mencerminkan peran strategis Satpol PP dalam mendukung stabilitas pemerintahan dan kondusivitas wilayah melalui kegiatan pengamanan, baik terhadap kegiatan formal pemerintahan maupun potensi dinamika sosial masyarakat. Ke depan, optimalisasi peran ini perlu didukung oleh peningkatan kapasitas personel, penyediaan sarana-prasarana modern, serta penguatan koordinasi lintas sektor agar kualitas layanan keamanan dan ketertiban dapat terus terjaga secara profesional dan adaptif terhadap tantangan zaman.



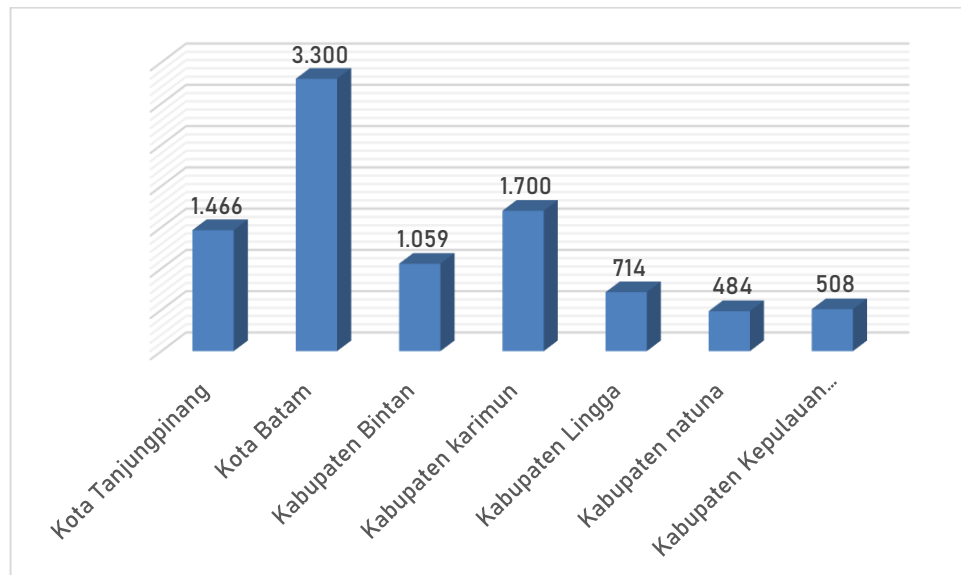
Gambar 2.6 Pengamanan Event Pemerintahan dan Pengamanan Unjuk Rasa Oleh Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

Sumber: Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Tahun 2025

Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 tercatat sebanyak 9.231 personel yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Kota Batam memiliki jumlah Linmas terbanyak yaitu 3.300 personel, mencerminkan kebutuhan tinggi akan pengamanan dan ketertiban masyarakat seiring dengan statusnya sebagai pusat ekonomi dan kepadatan penduduk yang tinggi. Disusul oleh Kabupaten Karimun dengan 1.700 personel dan Kota Tanjungpinang sebagai ibu kota provinsi dengan 1.466 personel, keduanya menunjukkan kesiapan dalam menjaga ketertiban dan penanganan bencana lokal.

Kabupaten Bintan memiliki 1.059 personel, sementara Kabupaten Lingga, Natuna, dan Kepulauan Anambas masing-masing memiliki jumlah yang lebih rendah, yakni 714, 484, dan 508 personel. Jumlah Linmas di wilayah kabupaten ini cenderung mencerminkan luas wilayah yang lebih besar namun dengan kepadatan penduduk yang rendah serta keterbatasan akses geografis yang menantang, khususnya di wilayah kepulauan terluar.

Secara keseluruhan, jumlah total 9.231 personel Linmas di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 menunjukkan kesiapan yang cukup baik dalam mendukung ketenteraman, ketertiban, serta penanggulangan keadaan darurat di tingkat lokal. Namun demikian, diperlukan langkah lanjutan untuk pemerataan distribusi dan peningkatan kapasitas Linmas, terutama di wilayah yang secara geografis terpencil dan rawan bencana, guna memastikan efektivitas layanan perlindungan masyarakat secara merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah provinsi.



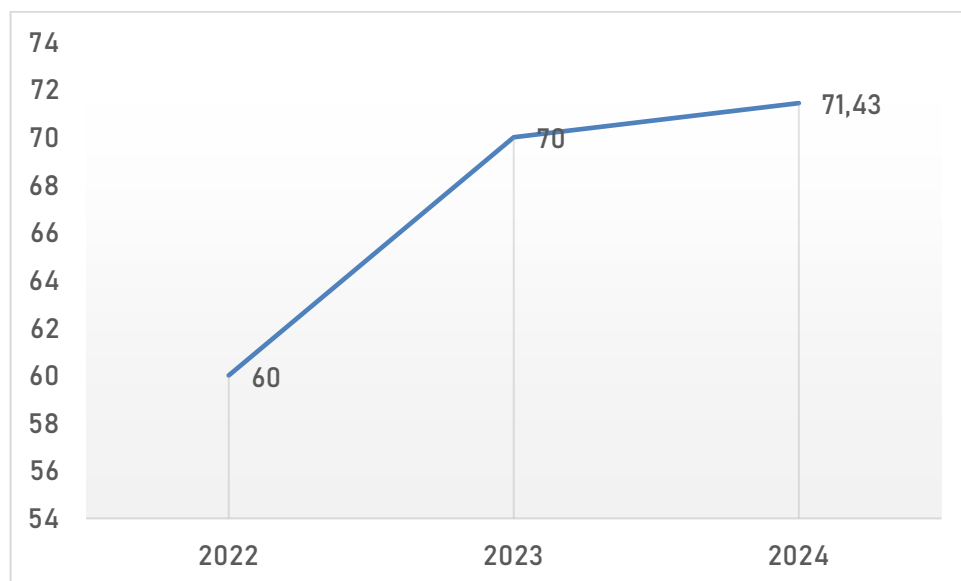
Gambar 2.7 Jumlah Anggota Linmas di Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Sumber: Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Tahun 2025

Kinerja penanggulangan kebakaran di Provinsi Kepulauan Riau selama periode 2022 hingga 2024 menunjukkan tren positif, khususnya dalam aspek penyelesaian dokumen kebakaran dan/atau tindak lanjutnya. Pada tahun 2022, persentase penyelesaian tercatat sebesar 60%, kemudian mengalami peningkatan menjadi 70% pada tahun 2023, dan terus naik menjadi 71,43% pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan perbaikan dalam aspek administratif dan respons pascakebakaran, baik dalam hal pelaporan, penyelidikan, maupun langkah-langkah pencegahan lanjutan.

Peningkatan kinerja ini dapat mencerminkan semakin membaiknya koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penerapan sistem manajemen penanggulangan kebakaran yang lebih efektif. Meskipun capaian tahun 2024 belum mencapai 100%, angka 71,43% menunjukkan bahwa mayoritas insiden kebakaran sudah direspons dengan dokumentasi dan tindak lanjut yang memadai. Namun demikian, masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam mempercepat proses administrasi dan penanganan komprehensif terhadap penyebab kebakaran serta dampak lanjutan yang ditimbulkannya.

Ke depan, perlu dilakukan penguatan dalam sistem pelaporan terintegrasi, pelatihan rutin bagi petugas pemadam kebakaran, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelaporan insiden secara cepat dan lengkap. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendorong capaian penyelesaian dokumen kebakaran hingga mencapai tingkat optimal dan akuntabel.



Gambar 2.8 Persentase Penyelesaian Dokumen Kebakaran dan/atau Tindak Lanjutnya di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2024

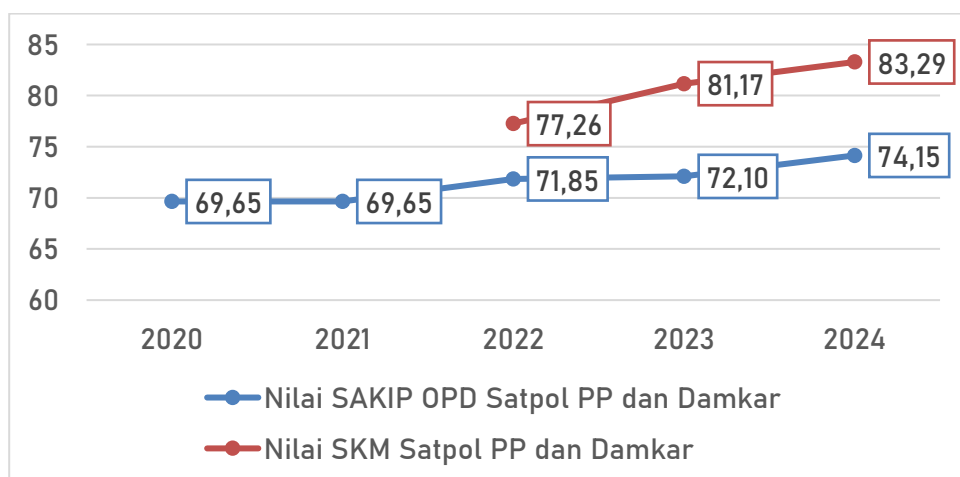
Sumber: Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Tahun 2025

Kinerja penyelenggaraan pelayanan dan tata kelola Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan peningkatan yang konsisten, baik dari sisi akuntabilitas kinerja maupun kepuasan masyarakat. Hal ini tercermin dari dua indikator utama, yaitu Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Pertama, nilai SAKIP Satpol PP dan Damkar mengalami kenaikan dari 69,65 pada tahun 2020 dan 2021, menjadi 71,85 pada tahun 2022, naik sedikit menjadi 72,10 pada 2023, dan terus meningkat menjadi 74,15 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa tata kelola kinerja organisasi semakin baik, dengan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja yang semakin terintegrasi dan akuntabel. Capaian ini mengindikasikan komitmen terhadap transparansi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Kedua, nilai SKM Satpol PP dan Damkar juga menunjukkan tren yang sangat positif, yaitu dari 77,26 pada tahun 2022, meningkat menjadi 81,17 pada 2023, dan mencapai 83,29 pada 2024. Meningkatnya nilai SKM menggambarkan kepuasan publik yang semakin tinggi terhadap layanan yang diberikan oleh Satpol PP dan Damkar, baik dalam aspek ketertiban umum, penegakan Perda, maupun respons terhadap penanggulangan kebakaran. Hal ini dapat dikaitkan dengan perbaikan kualitas pelayanan, peningkatan kapasitas personel, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.

Secara keseluruhan, kombinasi peningkatan nilai SAKIP dan SKM mencerminkan perbaikan yang berimbang antara tata kelola internal organisasi dan pengalaman pelayanan yang dirasakan masyarakat. Ke depan, upaya peningkatan kinerja perlu difokuskan pada inovasi pelayanan publik, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan kolaborasi antarinstansi, guna mencapai pelayanan yang lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada hasil.



Gambar 2.9 Perkembangan Nilai SAKIP dan Nilai SKM Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

Sumber: Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Tahun 2025

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki kelompok sasaran layanan yang menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan program dan kegiatan. Kelompok sasaran ini merupakan pihak-pihak yang secara langsung menerima manfaat dari layanan publik yang diselenggarakan, baik berupa individu, kelompok masyarakat, lembaga, maupun pelaku usaha, sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan OPD terkait. Penetapan kelompok sasaran dilakukan secara terencana dan partisipatif, dengan mempertimbangkan kebutuhan, karakteristik wilayah, serta arah kebijakan pembangunan daerah, sehingga pelaksanaan pelayanan publik dapat berlangsung secara tepat sasaran, efisien, dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran memberikan pelayanan kepada berbagai kelompok sasaran yang berkaitan dengan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat khususnya terkait dengan penegakan hukum daerah dan juga penanggulangan kebakaran. Kelompok sasaran pelayanan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau antara lain:

1. Masyarakat Umum

Warga Provinsi Kepulauan Riau yang memerlukan perlindungan terhadap ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan penanggulangan kebakaran. Dan juga termasuk masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana kebakaran atau yang terdampak gangguan ketertiban umum seperti pasar, kawasan permukiman, dan tempat hiburan.

2. Pelaku Usaha

Pelaku usaha informal yang beraktivitas di ruang publik dan memerlukan pengawasan agar sesuai dengan ketentuan perda dan perkara.

3. Perangkat Daerah

Perangkat Daerah yang membutuhkan bantuan penegakan Perda/Perkada, misalnya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, dan lainnya. Serta Unit kerja di lingkungan Pemprov Kepri yang membutuhkan dukungan pengamanan, pengawalan, atau pengendalian gangguan keamanan.

4. Organisasi/Lembaga Masyarakat

Organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan relawan yang bekerja sama dalam pembinaan ketertiban dan kesiapsiagaan bencana kebakaran.

5. Pelanggar Peraturan Daerah dan Perkada

Individu atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah yang menjadi objek tindakan preventif atau represif non-yustisial oleh Satpol PP.

6. Linmas

Linmas merupakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk menjaga keamanan dan ketertiban, membantu dalam penanggulangan bencana, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Linmas menjadi SDM yang diberdayakan dalam menciptakan masyarakat yang aman, tangguh terhadap bencana, dan harmonis, serta bertindak sebagai perekat sosial.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak sebagai mitra kerja untuk mendukung pelaksanaan program dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mendukung efektivitas pelayanan publik dalam bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran menjalin kerja sama strategis dengan berbagai pihak, antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau

- Satpol PP dan Damkar Kabupaten/Kota, sebagai mitra operasional dan teknis di lapangan untuk sinergi penegakan perda, patroli bersama, dan koordinasi penanggulangan bencana kebakaran lintas wilayah.
- Badan/Dinas Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota, untuk kolaborasi penanganan kedaruratan dan evakuasi.

2. Perangkat Daerah Provinsi

- Beberapa perangkat daerah yang Biro Hukum dan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepri, sebagai pendukung legal dan regulasi dalam pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada.
- BPBD Provinsi Kepri, dalam aspek koordinasi tanggap darurat bencana dan integrasi sistem peringatan dini.
- Dinas Kesehatan, dalam evakuasi korban kebakaran, serta kesiapan logistik medis.

- Dinas Kominfo, untuk publikasi, penyebarluasan informasi ketertiban umum dan sistem peringatan kebakaran.
 - Dinas teknis lainnya (Perhubungan, Lingkungan Hidup, Sosial, Pendidikan, dan lain-lain) dalam penegakan kebijakan daerah di bidang masing-masing.
3. Instansi Vertikal dan Aparat Keamanan
- Polda Kepulauan Riau dan Polres setempat, untuk mendukung penertiban dan tindakan represif ketika diperlukan dalam penegakan perda yang bersinggungan dengan hukum pidana atau kerawanan keamanan.
 - TNI (Kodam, Kodim, Lanal), terutama dalam kegiatan bersama pengamanan wilayah dan penanggulangan bencana.
 - BASARNAS, untuk operasi penyelamatan dan evakuasi kebakaran atau bencana air di wilayah kepulauan.
4. Instansi Non-Pemerintah
- Pemadam Kebakaran swasta dan relawan kebakaran, seperti pemadam perusahaan industri, bandara, pelabuhan, dan kawasan komersial.
 - Organisasi masyarakat dan tokoh adat, sebagai mitra sosialisasi dan penyadaran masyarakat terhadap peraturan daerah serta pentingnya ketertiban dan kesiapsiagaan bencana.
 - Media massa dan komunitas digital, sebagai mitra dalam penyebaran informasi dan edukasi publik terkait ketertiban umum, larangan pembakaran liar, dan prosedur penyelamatan.

2.1.6. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggungjawab Perangkat Daerah

Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau, khususnya dengan pemerintah kabupaten/kota, bertujuan untuk memperkuat koordinasi, efisiensi sumber daya, dan efektivitas pelayanan di bidang ketertiban umum, penegakan perda, serta penanggulangan kebakaran. Adapun bentuk dan ruang lingkup kerja sama tersebut mencakup:

1. Kerja Sama Penegakan Peraturan Daerah (Perda dan Perkada)
- Operasi terpadu penegakan perda antara Satpol PP Provinsi dan Satpol PP Kabupaten/Kota, seperti penertiban pedagang kaki lima, penataan reklame, penegakan jam operasional usaha, dan pengawasan kawasan tertib.
 - Pertukaran informasi hukum dan kebijakan daerah untuk menyamakan pemahaman dalam pelaksanaan penegakan Perda.

- Penguatan kapasitas SDM penegak perda melalui pelatihan bersama dan asistensi teknis dari provinsi ke kabupaten/kota.
- 2. Kerja Sama Penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran
 - Pembentukan dan penguatan pos damkar bersama di kawasan rawan kebakaran lintas wilayah administratif.
 - Pemanfaatan bersama sarana-prasarana pemadam seperti mobil damkar, pompa, dan alat keselamatan yang dimiliki provinsi untuk membantu kabupaten/kota yang terbatas.
 - Sistem komando terpadu dalam penanganan kejadian kebakaran skala besar, termasuk evakuasi dan penyelamatan.
- 3. Kerja Sama Tanggap Darurat dan Penanganan Bencana Non-alam
 - Koordinasi dengan BPBD dan Damkar kabupaten/kota dalam situasi darurat seperti bencana industri, kecelakaan laut, dan kebakaran pemukiman.
 - Skenario latihan bersama (simulasi) antara provinsi dan kabupaten/kota untuk kesiapsiagaan bencana.
- 4. Kerja Sama Pembinaan Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat
 - Edukasi dan penyuluhan bersama tentang ketertiban umum, pencegahan kebakaran, dan peran masyarakat dalam menjaga lingkungan.
 - Pembinaan Linmas (Perlindungan Masyarakat) secara terkoordinasi agar siap mendukung tugas Satpol PP di lapangan.
- 5. Kerja Sama Pendataan dan Sistem Informasi
 - Pengembangan sistem informasi terpadu antar-tingkat pemerintahan untuk laporan kejadian gangguan ketertiban dan insiden kebakaran secara real-time.
 - Basis data bersama terkait titik-titik rawan pelanggaran Perda dan kawasan rawan kebakaran.
- 6. Kerja Sama Penguatan Kelembagaan
 - Dukungan peningkatan kapasitas unit Satpol PP dan Damkar kabupaten/kota sesuai standar pelayanan minimal (SPM).
 - Kerja sama dalam penyusunan SOP lintas wilayah dan pembentukan tim terpadu provinsi-kabupaten/kota.
- 7. Kerja Sama dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset
 - Penggunaan bersama fasilitas pelatihan, garasi armada, pos damkar, dan sarana penunjang lainnya antara provinsi dan kabupaten/kota.
 - Optimalisasi aset daerah untuk kebutuhan bersama, terutama di wilayah perbatasan administratif yang memiliki potensi konflik atau risiko bencana.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

2.2.1 Permasalahan

Berdasarkan analisis data kinerja Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020–2024, berikut adalah beberapa rumusan permasalahan utama yang dapat disusun secara sistematis sebagai berikut.

1. Belum optimalnya Penegakan Perda dan Perkada. Capaian persentase penegakan Perda dan Perkada mengalami ketidakstabilan, dengan penurunan tajam pada tahun 2021 sebesar 4,76% dan peningkatan kembali setelahnya, kemudian menurun dari sebesar 91,67% pada tahun 2022 menjadi sebesar 41,67% pada tahun 2024.
2. Belum Optimalnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi. Meskipun nilai SAKIP menunjukkan tren peningkatan, capaian masih berada di bawah kategori sangat baik (nilai < 75). Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, efektivitas pelaksanaan program, dan integrasi perencanaan dan pelaporan kinerja masih perlu ditingkatkan.
3. Gangguan Trantibum yang Masih banyak Terjadi. Jumlah Kasus Pelanggaran Trantibum di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2024 fluktuatif dari sebesar 16 kasus pada tahun 2021 menjadi 74 kasus pada tahun 2022 dan 17 kasus pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa pendekatan preventif terhadap gangguan trantibum masih perlu diperkuat.
4. Penyelesaian dokumen dan Tindak Lanjut Kebakaran Belum Maksimal. Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan tindak lanjutnya menunjukkan capaian yang belum optimal baru mencapai 71,43% pada 2024. Hal ini berpotensi menghambat pencegahan kejadian kebakaran.
5. Pelaksanaan Patroli belum optimal. Meski tren jumlah patroli meningkat dari 30 kali pada 2020 menjadi 84 pada tahun 2024, namun perlu ditingkatkan kedepan agar dapat mencegah dan menangani terjadinya gangguan trantibum.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis pembangunan jangka menengah yang menjadi perhatian Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau berfokus pada penguatan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta mitigasi dan penanggulangan bencana kebakaran. Seiring meningkatnya dinamika sosial, urbanisasi, dan pertumbuhan kawasan permukiman serta kawasan industri di wilayah provinsi kepulauan, tantangan terhadap efektivitas penegakan peraturan daerah, pengendalian gangguan ketenteraman masyarakat, dan respon terhadap situasi darurat seperti kebakaran menjadi semakin kompleks. Dalam merumuskan isu strategis ini, Satuan Polisi Pamong Praja dan

Penanggulangan Kebakaran melakukan identifikasi terhadap berbagai kondisi dan risiko yang berkembang di masyarakat, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta sinergi antarinstansi. Seluruh analisis tersebut menjadi dasar dalam penentuan arah kebijakan strategis guna mendukung terciptanya wilayah yang aman, tertib, dan tanggap terhadap ancaman kebakaran dan ketidakamanan lingkungan.



Tabel 2.2
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Satuan Polisi pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
• Kepri memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Indonesia di wilayah barat, berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, dan jalur pelayaran internasional. • Kepri memiliki personel Satpol PP dan Damkar yang telah memiliki pengalaman menghadapi berbagai kondisi kedaruratan dan penertiban, terutama di wilayah urban seperti Batam, Tanjungpinang, dan Bintan. • Satpol PP dan Damkar telah menjadi perangkat daerah yang hadir di seluruh kabupaten/kota,	• Belum optimalnya Penegakan Perda dan Perkada. • Belum Optimalnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi. • Gangguan Trantibum yang Masih banyak Terjadi. • Penyelesaian dokumen dan Tindak Lanjut Kebakaran Belum Maksimal. • Pelaksanaan Patroli belum optimal.	• -	• Meningkatnya mobilitas penduduk, termasuk arus tenaga kerja migran dan wisatawan mancanegara, menimbulkan potensi gangguan ketenteraman dan konflik sosial. • Meningkatnya aktivitas lintas negara seperti penyelundupan barang ilegal, narkoba, dan perdagangan	• Pemerintah pusat mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan otonomi daerah, termasuk penguatan peran Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). • Pentingnya daerah memperkuat	• Kawasan BBK (Batam-Bintan-Karimun) berkembang pesat sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan perdagangan bebas, yang berdampak pada tingginya mobilitas penduduk, konflik lahan, dan kepadatan aktivitas ekonomi. • Beberapa wilayah di Sumatera,	• Belum optimalnya Penyelenggaraan trantibum, dipengaruhi kompensasi SDM, sarana prasarana trantibum yang belum memadai • Belum optimalnya Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), dipengaruhi oleh kompensasi SDM dan sarana prasarana Satlinmas yang belum memadai. • Belum optimalnya



Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
yang dapat dimaksimalkan melalui kerja sama lintas daerah.			orang (human trafficking) yang memanfaatkan wilayah perbatasan sebagai pintu masuk. • Perubahan iklim global menyebabkan peningkatan risiko kebakaran hutan, lahan, dan kawasan pemukiman akibat musim kemarau berkepanjangan dan suhu ekstrem.	ketangguhan terhadap bencana, termasuk kebakaran, melalui integrasi penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan.	termasuk Kepri, menghadapi musim kering yang memperbesar potensi karhutla, terutama di pulau-pulau dengan tutupan lahan kering atau semak belukar. • Terdapat kesenjangan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran antar kabupaten/kota di Kepri, terutama di wilayah kepulauan yang sulit dijangkau.	Penyelenggaraan penanganan Kebakaran, dipengaruhi kompensasi SDM, sarana prasarana kebakaran yang belum memadai.

Dari penyimpulan atas kondisi kewilayahan Provinsi Kepulauan Riau dan kondisi dinamis baik global, nasional maupun regional, maka rumusan isu strategis pembangunan jangka menengah yang menjadi tantangan bagi Satuan Polisi dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Penyelenggaraan trantibum, dipengaruhi kompetensi SDM, sarana prasarana trantibum yang belum memadai
2. Belum optimalnya Penyelenggaran Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), dipengaruhi oleh kompetensi SDM dan sarana prasarana Satlinmas yang belum memadai.
3. Belum optimalnya Penyelenggaraan penanganan Kebakaran, dipengaruhi kompetensi SDM, sarana prasarana kebakaran yang belum memadai.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran jangka menengah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Pemerintahan Daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan Visi pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Upaya ini bertujuan agar setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas terkait berjalan searah dan mendukung pencapaian visi serta misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau 2025-2029, sekaligus tetap memperhatikan arahan RPJMN 2025-2029.

Salah satu arah kebijakan nasional sesuai RPJMN tahun 2025-2029 adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dilaksanakan melalui:

1. Melakukan peningkatan kemampuan penanganan konflik sosial dan pengamanan objek vital
2. Melakukan peningkatan efektivitas penyelesaian tindak pidana

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029, visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 yaitu “Kepulauan Riau Maju, Makmur dan Merata” dengan misi sebagai berikut:

- Misi 1: Peningkatan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah
- Misi 2: Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah
- Misi 3: Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berkarakter
- Misi 4: Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan
- Misi 5: Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Misi yang terkait tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran yaitu misi keempat (ke-4) *“Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan”*. Dalam RPJMD, misi tersebut menggambarkan pentingnya penguatan kapasitas aparatur dan penegakan ketertiban umum yang profesional, berintegritas, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran, pengembangan layanan berbasis teknologi informasi, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta optimalisasi peran dalam menjaga keamanan, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan RPJMD yang terkait dengan Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang berbasis digital, dengan sasaran RPJMD yang terkait yaitu Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban, yang diukur dengan indikator Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, tujuan yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran yaitu meningkatnya ketenteraman dan ketertiban. Tujuan tersebut diukur dengan menggunakan indeks penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Sasaran yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran yaitu meningkatnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, manajemen satlinmas dan penanganan kebakaran, dengan indikator:

1. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum
2. Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)
3. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.1 sebagaimana berikut ini.



Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban	Meningkatnya Ketenteraman Dan Ketertiban		Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat (Indeks)	59,93	61,31	68,46	73,15	77,3	79,55	81,15	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum, manajemen satlinmas dan Penanganan Kebakaran	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum (Indeks)	69,69	72,45	75,54	77,13	78,64	81,89	84,17	
			Indeks Penyelenggaran Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) (Indeks)	27,09	28,49	42,97	51,60	60,40	63,17	66,91	
			Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran (Indeks)	83,00	83,00	86,86	90,71	92,86	93,57	95,71	

3.2. Strategi

Strategi dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Tahun 2025–2029 merupakan rencana tindakan komprehensif yang memuat langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan secara sistematis dan terintegrasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah perangkat daerah. Sesuai dengan pengertian dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, strategi disusun dengan memperhatikan aspek optimalisasi sumber daya, tahapan pelaksanaan, fokus kerja, dan lokus intervensi, sehingga menjadi panduan operasional dalam mewujudkan pembangunan bidang penegakan hukum daerah dan juga penanggulangan kebakaran yang lebih baik. Strategi ini juga berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan makro RPJMD dengan kebijakan teknis sektoral, yang akan dituangkan lebih lanjut ke dalam arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah secara tahunan.

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum, manajemen satlinmas dan Penanganan Kebakaran
 - a. Optimalisasi Sumberdaya:
 - 1) Penguatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui pelatihan teknis dan disiplin.
 - 2) Penyediaan sarana prasarana patroli, pos pengamanan, dan dukungan transportasi lapangan.
 - 3) Pemanfaatan teknologi informasi (CCTV, dashboard pengawasan).
 - 4) Penambahan unit armada damkar dan perlengkapan keselamatan.
 - 5) Peningkatan kapasitas regu damkar dan relawan pemadam.
 - 6) Penguatan sistem komando dan respon cepat penanganan kebakaran
 - b. Fokus:
 - 1) Penegakan Perda, pencegahan pelanggaran, penguatan kesadaran masyarakat.
 - 2) Pencegahan kebakaran, peningkatan waktu respon, edukasi masyarakat.
 - c. Lokus:
 - 1) Titik rawan pelanggaran Trantibum, pusat keramaian.
 - 2) Kawasan padat penduduk dan wilayah rawan bencana kebakaran.

Tabel 3.2
Penahapan Pembangunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan
Penanggulangan Kebakaran Tahun 2025–2029

2026	2027	2028	2029	2030
Pemetaan titik rawan pelanggaran, peningkatan kapasitas dasar anggota	Penguatan patroli wilayah dan forum komunikasi masyarakat.	Pengembangan sistem aduan dan respon cepat berbasis digital.	Evaluasi efektivitas operasi penegakan Perda dan SOP keamanan lingkungan	Replikasi inovasi penanganan gangguan Trantibum ke seluruh wilayah kab/kota
Pemetaan kawasan rawan kebakaran dan penyusunan peta risiko.	Pengadaan sarana damkar dan pelatihan petugas secara menyeluruh.	Pengembangan sistem informasi kebakaran dan pusat kendali terpadu	Simulasi tanggap darurat dan kampanye edukatif berbasis komunitas	Integrasi layanan kebakaran antar kabupaten/kota dan evaluasi menyeluruh layanan

3.3. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Tahun 2025–2029 merupakan rangkaian kerja yang dirumuskan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta selaras dengan strategi yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra. Mengacu pada ketentuan dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, arah kebijakan menjadi penjabaran lebih teknis dari strategi, yang memandu penyusunan program dan kegiatan secara lebih terfokus, adaptif, dan terukur.

Berikut adalah rumusan arah kebijakan untuk masing-masing sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran yang terkait dengan strategi yang telah dirumuskan sebelumnya, berdasarkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang arah kebijakan pelaksanaan Renstra.

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui:
 - a. Memperkuat kapasitas personel Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketenteraman umum melalui pelatihan teknis, kedisiplinan, dan pemantapan tugas operasional di lapangan.

- b. Mengembangkan sistem deteksi dini dan respons cepat terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban berbasis teknologi informasi, seperti pengawasan CCTV dan sistem pelaporan daring masyarakat.
 - c. Mengintensifkan patroli wilayah dan pengawasan lapangan secara terjadwal dan berbasis peta kerawanan wilayah guna mencegah potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban.
 - d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kelembagaan lokal melalui pembentukan forum kewaspadaan dini masyarakat, kemitraan keamanan lingkungan, dan edukasi hukum tentang ketertiban umum.
 - e. Mendorong sinergi antar-perangkat daerah dan unsur vertikal (TNI/Polri) dalam pelaksanaan operasi gabungan penegakan Perda dan penanganan gangguan ketertiban umum.
 - f. Mengoptimalkan pengelolaan sarana prasarana pendukung Satuan Polisi Pamong Praja seperti kendaraan operasional, posko, serta alat komunikasi dan perlindungan personel untuk menunjang efektivitas di lapangan.
2. Meningkatkan pencegahan dan kualitas layanan penanggulangan kebakaran adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pemadam kebakaran melalui pelatihan teknis penyelamatan, penanganan kebakaran bangunan, hutan, dan lahan, serta pelatihan tanggap darurat berbasis standar nasional.
 - b. Memperkuat sistem pencegahan kebakaran berbasis mitigasi risiko, melalui pemetaan kawasan rawan kebakaran, pemasangan rambu bahaya, serta pembentukan relawan damkar di permukiman padat dan kawasan industri.
 - c. Mengembangkan sistem informasi dan pusat komando terpadu (command center) untuk mendukung respons cepat penanganan kebakaran secara real-time antar wilayah kabupaten/kota.
 - d. Mengoptimalkan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, termasuk penambahan armada damkar yang sesuai dengan kondisi geografis kepulauan, alat pemadam ringan, alat pelindung diri, dan pembangunan pos damkar strategis.
 - e. Menggalakkan edukasi masyarakat dan simulasi penanggulangan kebakaran secara berkala dengan melibatkan sekolah, industri, kelompok masyarakat, serta lembaga keagamaan untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan publik.

- f. Mendorong integrasi sistem layanan kebakaran antar kabupaten/kota dalam lingkup provinsi untuk memperkuat koordinasi lintas wilayah dan respons bencana yang cepat dan efisien.

Perumusan Arah Kebijakan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3
Perumusan Arah Kebijakan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum, manajemen satlinmas dan Penanganan Kebakaran	a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Penegakan Perda Provinsi dan peraturan gubernur. c. Pembinaan PPNS provinsi.	Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	1. Meningkatkan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui a. Memperkuat kapasitas personel Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketenteraman umum melalui pelatihan teknis, kedisiplinan, dan pemantapan tugas operasional di lapangan. b. Mengembangkan sistem deteksi dini dan respons cepat terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban berbasis teknologi informasi, seperti pengawasan CCTV dan sistem pelaporan daring masyarakat. c. Mengintensifkan patroli wilayah dan pengawasan lapangan secara terjadwal dan berbasis peta kerawanan wilayah guna mencegah potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban. d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kelembagaan lokal melalui pembentukan forum kewaspadaan dini masyarakat, kemitraan

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

Tujuan	Sasaran	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
				keamanan lingkungan, dan edukasi hukum tentang ketertiban umum. d. Mendorong sinergi antar-perangkat daerah dan unsur vertikal (TNI/Polri) dalam pelaksanaan operasi gabungan penegakan Perda dan penanganan gangguan ketertiban umum. e. Mengoptimalkan pengelolaan sarana prasarana pendukung Satuan Polisi Pamong Praja seperti kendaraan operasional, posko, serta alat komunikasi dan perlindungan personel untuk menunjang efektivitas di lapangan.
		Penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran.		2. Meningkatkan pencegahan dan kualitas layanan penanggulangan kebakaran adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pemadam kebakaran melalui pelatihan teknis penyelamatan, penanganan kebakaran bangunan, hutan, dan lahan, serta pelatihan tanggap darurat berbasis standar nasional. b. Memperkuat sistem pencegahan kebakaran berbasis mitigasi risiko, melalui pemetaan kawasan rawan kebakaran, pemasangan rambu

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

Tujuan	Sasaran	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
				bahaya, serta pembentukan relawan damkar di permukiman padat dan kawasan industri. c. Mengembangkan sistem informasi dan pusat komando terpadu (<i>command center</i>) untuk mendukung respons cepat penanganan kebakaran secara real-time antar wilayah kabupaten/kota. d. Mengoptimalkan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, termasuk penambahan armada damkar yang sesuai dengan kondisi geografis kepulauan, alat pemadam ringan, alat pelindung diri, dan pembangunan pos damkar strategis. e. Menggalakkan edukasi masyarakat dan simulasi penanggulangan kebakaran secara berkala dengan melibatkan sekolah, industri, kelompok masyarakat, serta lembaga keagamaan untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan publik. f. Mendorong integrasi sistem layanan kebakaran antar kabupaten/kota dalam lingkup provinsi untuk memperkuat koordinasi lintas wilayah dan respons bencana yang cepat dan efisien.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan

4.1.1. Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 4) Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 5) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - 4) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan

- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 9) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pengadaan Mebel
 - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 5) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 7) Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah
2. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum
 - a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - 1) Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
 - 2) Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP
 - 3) Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi
 - 4) Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi

- 5) Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- 6) Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
- 7) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
- 8) Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat
- 9) Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi
- 10) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja
- 11) Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- 12) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum
- 13) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat
- b. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
 - 1) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
 - 2) Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah
 - 3) Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - 4) Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum
 - 5) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
 - 1) Kerja Sama AntarLembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah
 - 2) Dukungan Operasional Sekretariat PPNS
 - 3) Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum
 - 4) Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum

3. Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
 - a. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran Bencana
 - 1) Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran
 - 2) Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - 3) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
 - 4) Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran
 - 5) Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran
 - 6) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - 7) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - 8) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
 - 9) Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran
 - b. Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - 1) Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - 2) Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
 - 3) Penyusunan SOP layanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan lintas provinsi dan lintas kabupaten/kota.

Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator dan target kinerja tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan Renstra
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>
- Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban	Meningkatnya Ketenteraman Dan Ketertiban				Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat (Indeks)	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum, manajemen satlinmas dan Penanganan Kebakaran			Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum (Indeks)	
					Indeks Penyelenggaran Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) (Indeks)	
					Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran (Indeks)	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dan		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau			
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
					Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
				Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.05.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.05.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.05.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
					Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	1.05.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.05.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1.05.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	1.05.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Keuangan Akhir Tahun SKPD
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1.05.01.1.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
				Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.05.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.05.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	1.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.05.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.05.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1.05.01.1.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.05.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
				Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Dinamis pada SKPD (Dokumen)	Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.05.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.05.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.05.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah		

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1.05.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	1.05.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	Perlengkapan Kantor
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/ Rehabilitasi (Ha)	1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.05.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.05.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Jumlah Peralatan dan	1.05.01.1.09.0006 -

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/ Rehabilitasi (Ha)	1.05.01.1.09.0012 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah
					Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
					Persentase anggota Satlinmas yang telah ditingkatkan kapasitasnya (%)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
					Persentase SDM aparatur	1.05.02 - PROGRAM

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					satpol PP yang ditingkatkan kompetensinya (%)	PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
					Persentase perda dan/atau perkara yang ditegakkan (%)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
					Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya ((%))	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
				Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi (Dokumen)	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
					Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Masyarakat yang sah dan legal (Dokumen)	
					Jumlah Dokumen SK Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP (Dokumen)	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
					Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur (Dokumen)	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
					Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Penindakan (Laporan)	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan (laporan)	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
					Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada (Laporan)	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
					Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah (Laporan)	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
					Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Pelindungan Masyarakat (Laporan)	
					Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
					Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
					Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	1.05.02.1.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
					Jumlah Dokumen SK Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP (Dokumen)	1.05.02.1.01.0011 - Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP
					Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK	1.05.02.1.01.0012 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Gubernur (Dokumen)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi (Dokumen)	1.05.02.1.01.0014 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
					Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada (Laporan)	1.05.02.1.01.0015 - Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	1.05.02.1.01.0020 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan	1.05.02.1.01.0021 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Pengawasan (laporan)	Pengawasan
					Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat (Laporan)	1.05.02.1.01.0022 - Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat
					Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah (Laporan)	1.05.02.1.01.0023 - Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi
					Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	1.05.02.1.01.0024 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja
					Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal (Dokumen)	1.05.02.1.01.0025 - Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
					Jumlah Sarana dan	1.05.02.1.01.0029 -

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum
					Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	1.05.02.1.01.0030 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat
				Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)	1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
					Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Dokumen)	1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP (Laporan)	1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan	1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Laporan)	dan Peraturan Gubernur
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Laporan)	1.05.02.1.02.0002 - Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
					Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)	1.05.02.1.02.0009 - Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.1.02.0010 - Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
					Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan	1.05.02.1.02.0011 - Penyusunan SOP Penegakan Peraturan

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Kepala Daerah (Dokumen)	Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP (Laporan)	1.05.02.1.02.0012 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
				Meningkatnya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)	1.05.02.1.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)	1.05.02.1.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
					Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (laporan)	1.05.02.1.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung	1.05.02.1.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)	1.05.02.1.03.0004 - Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah
					Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (laporan)	1.05.02.1.03.0005 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	1.05.02.1.03.0007 - Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)	1.05.02.1.03.0008 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum
			Meningkatnya Pencegahan kebakaran		Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
				Meningkatnya Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan,	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Dokumen)	
					Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal (Dokumen)	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal (Dokumen)	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Laporan)	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
					Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (laporan)	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
					Jumlah Sarana dan	1.05.04.1.01 -

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
					Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran (Orang)	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal (Dokumen)	1.05.04.1.01.0002 - Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)	1.05.04.1.01.0004 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	1.05.04.1.01.0013 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal (Dokumen)	1.05.04.1.01.0019 - Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran
					Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (laporan)	1.05.04.1.01.0021 - Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
					Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal (Dokumen)	1.05.04.1.01.0022 - Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Laporan)	1.05.04.1.01.0023 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan,	1.05.04.1.01.0024 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan,

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Dokumen)	Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	1.05.04.1.01.0027 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
					Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran (Orang)	1.05.04.1.01.0039 - Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.05.04.1.02 - Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non	1.05.04.1.02 - Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Kebakaran (Laporan)	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Laporan)	1.05.04.1.02 - Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Laporan)	1.05.04.1.02.0002 - Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Laporan)	1.05.04.1.02.0004 - Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
					Jumlah Dokumen SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.05.04.1.02.0005 - Penyusunan SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

Perincian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Rencana Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan dan Pendanaan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				26.687.773.602,14		26.103.939.305,00		26.103.939.305,00		26.103.939.305,00		31.103.939.305,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				23.929.723.602,14		22.531.303.952,00		22.531.303.952,00		22.531.303.952,00		25.531.303.952,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB	23.929.723.602,14	BB	22.531.303.952,00	BB	22.531.303.952,00	BB	22.531.303.952,00	BB	25.531.303.952,00	1.05.0.00.0.00.05.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84,06	84,71		85,10		85,36		86,31		86,52		
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	78,16	79,19		80,88		82,35		84,12		85,26		
1.05.01.1.01 - Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				275.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00	
Meningkatnya Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	6	275.000.000,00	6	350.000.000,00	6	350.000.000,00	6	350.000.000,00	6	350.000.000,00	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	1		1		1		1		1		

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1		1		1		1				
1.05.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	100.000.000,00	2	125.000.000,00	2	125.000.000,00	2	125.000.000,00	2	125.000.000,00	
1.05.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				100.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	6	100.000.000,00	6	125.000.000,00	6	125.000.000,00	6	125.000.000,00	6	125.000.000,00	
1.05.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	1	50.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	
1.05.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				21.321.391.997,14		19.319.164.859,00		19.319.164.859,00		19.319.164.859,00		22.319.164.859,00	
Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	4	21.321.391.997,14	4	19.319.164.859,00	4	19.319.164.859,00	4	19.319.164.859,00	4	22.319.164.859,00	

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	71	216		216		216		216		216		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	4		4		4		4		4		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	4		4		4		4		4		
1.05.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				20.761.391.997,14		18.768.154.859,00		18.768.154.859,00		18.768.154.859,00		21.748.154.859,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	71	216	20.761.391.997,14	216	18.768.154.859,00	216	18.768.154.859,00	216	18.768.154.859,00	216	21.748.154.859,00	
1.05.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				410.000.000,00		401.010.000,00		401.010.000,00		401.010.000,00		421.010.000,00	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	4	410.000.000,00	4	401.010.000,00	4	401.010.000,00	4	401.010.000,00	4	421.010.000,00	
1.05.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	
1.05.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tahun SKPD	Tahun SKPD (Laporan)												
1.05.01.1.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	
1.05.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	
1.05.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	
1.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				550.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	
Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	1	550.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	1		1		1		1		1		

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				475.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	475.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	
1.05.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
1.05.01.1.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
1.05.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				25.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	1	25.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				460.000.000,00		795.000.000,00		795.000.000,00		795.000.000,00		795.000.000,00	
Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	460.000.000,00	1	795.000.000,00	1	795.000.000,00	1	795.000.000,00	1	795.000.000,00	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1				
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4		4		4		4				

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	4		4		4		4		4		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	4		4		4		4				
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1		1				
1.05.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	10.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	
1.05.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
1.05.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
1.05.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
1.05.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				5.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
1.05.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	4	300.000.000,00	4	600.000.000,00	4	600.000.000,00	4	600.000.000,00	4	600.000.000,00	
1.05.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	
1.05.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				10.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1	10.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	
1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				365.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00	

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	14	2	365.000.000,00	2	450.000.000,00	2	450.000.000,00	2	450.000.000,00	2	450.000.000,00	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1		
1.05.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
1.05.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
1.05.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				65.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	14	2	65.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	
1.05.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
1.05.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)		(11)
Bangunan Lainnya														
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.05.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				508.331.605,00		322.000.000,00		322.000.000,00		322.000.000,00		322.000.000,00		
Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	4	508.331.605,00	4	322.000.000,00	4	322.000.000,00	4	322.000.000,00	4	322.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	4		4		4		4					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1					
1.05.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00		
1.05.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.05.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				258.331.605,00		72.000.000,00		72.000.000,00		72.000.000,00		72.000.000,00		

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
			(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	4	258.331.605,00	4	72.000.000,00	4	72.000.000,00	4	72.000.000,00	4	72.000.000,00	
1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				400.000.000,00		995.139.093,00		995.139.093,00		995.139.093,00		995.139.093,00	
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	400.000.000,00	1	995.139.093,00	1	995.139.093,00	1	995.139.093,00	1	995.139.093,00	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	38	45		45		45		45		45		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1		1		1		1		1		
	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10	21		21		21		21		21		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	4		4		4		4		4		
	1.05.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						50.000.000,00				63.325.000,00		

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	4	50.000.000,00	4	63.325.000,00	4	63.325.000,00	4	63.325.000,00	4	63.325.000,00	
1.05.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50.000.000,00		281.814.093,00		281.814.093,00		281.814.093,00		281.814.093,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10	21	50.000.000,00	21	281.814.093,00	21	281.814.093,00	21	281.814.093,00	21	281.814.093,00	
1.05.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	38	45	50.000.000,00	45	50.000.000,00	45	50.000.000,00	45	50.000.000,00	45	50.000.000,00	
1.05.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	50.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	
1.05.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
1.05.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
1.05.01.1.09.0012 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				2.174.050.000,00		1.762.635.353,00		1.762.635.353,00		1.762.635.353,00		3.762.635.353,00	
Meningkatnya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	100	100	2.174.050.000,00	100	1.762.635.353,00	100	1.762.635.353,00	100	1.762.635.353,00	100	3.762.635.353,00	1.05.0.00.0.00.05.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
	Persentase anggota Satlinmas yang telah ditingkatkan kapasitasnya (%)	1,62	2,71		3,25		3,79		4,33		4,87		
	Persentase SDM aparatur satpol PP yang ditingkatkan kompetensinya (%)	57,73	71,36		79,55		89,55		93,18		100,00		
	Persentase perda dan/atau perkara yang ditegakkan (%)	50	100		100		100		100		100		
	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya ((%))	N/A	74,36		75,23		76,10		76,97		77,84		
1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1.674.050.000,00		1.137.635.353,00		1.137.635.353,00		1.137.635.353,00		3.137.635.353,00	
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	1	4	1.674.050.000,00	4	1.137.635.353,00	4	1.137.635.353,00	4	1.137.635.353,00	4	3.137.635.353,00	

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	yang Dilakukan Penindakan (Laporan)												
	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)		50		50		50		50		50		
	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)		5		5		5		10				
	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat (Laporan)	1	1		1		1		1				
	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah (Laporan)	1	4		4		4		4				
	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada (Laporan)	1	1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan (laporan)	1	4		4		4		4				
	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)		15		18		22		18		15		

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH		
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur (Dokumen)		1				1				1				1
	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP (Dokumen)		1				1				1				1
	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal (Dokumen)		1				1				1				1
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi (Dokumen)	1	1				1				1				1
1.05.02.1.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00			
Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00			
1.05.02.1.01.0011 - Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP				20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00			

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terbentuknya Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP yang ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP (Dokumen)		1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
1.05.02.1.01.0012 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi				20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Terbentuknya Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur (Dokumen)		1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
1.05.02.1.01.0014 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
1.05.02.1.01.0015 - Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Pelayanan Dasar kepada warga negara yang terkena dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada (Laporan)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
1.05.02.1.01.0020 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00	

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	1	4	50.000.000,00	4	75.000.000,00	4	75.000.000,00	4	75.000.000,00	4	75.000.000,00	
1.05.02.1.01.0021 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				599.050.000,00		277.635.353,00		277.635.353,00		277.635.353,00		277.635.353,00	
Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan (laporan)	1	4	599.050.000,00	4	277.635.353,00	4	277.635.353,00	4	277.635.353,00	4	277.635.353,00	
1.05.02.1.01.0022 - Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Tersedianya laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Pelindungan Masyarakat dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat (Laporan)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
1.05.02.1.01.0023 - Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00	

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah (Laporan)	1	4	75.000.000,00	4	75.000.000,00	4	75.000.000,00	4	75.000.000,00	4	75.000.000,00	
1.05.02.1.01.0024 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)		15	100.000.000,00	18	100.000.000,00	22	100.000.000,00	18	100.000.000,00	15	100.000.000,00	
1.05.02.1.01.0025 - Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tersedianya Dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen pemetaan Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal (Dokumen)		1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
1.05.02.1.01.0029 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum				400.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		2.100.000.000,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)		5	400.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	10	2.100.000.000,00	
1.05.02.1.01.0030 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Terlaksananya Peningkatan Meningkatkan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)		50	150.000.000,00	50	150.000.000,00	50	150.000.000,00	50	150.000.000,00	50	150.000.000,00	

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur				260.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00	
Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)		1	260.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1	1				1				1		
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Laporan)	1	4				4				4		
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP (Laporan)	1	1				1				1		
	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Dokumen)		1				1				1		
1.05.02.1.02.0002 - Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				70.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Laporan)	1	4	70.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	
1.05.02.1.02.0009 - Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah				30.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)		1	30.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
1.05.02.1.02.0010 - Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
1.05.02.1.02.0011 - Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum				20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Dokumen)		1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
1.05.02.1.02.0012 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				40.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP (Laporan)	1	1	40.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
1.05.02.1.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi				240.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00	
Meningkatnya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil		1	240.000.000,00	1	275.000.000,00	1	275.000.000,00	1	275.000.000,00	1	275.000.000,00	

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)												
	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (laporan)		1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)		4				4				4		
	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)		1				1				1		
1.05.02.1.03.0004 - Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)		4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	
1.05.02.1.03.0005 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS				20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (laporan)		1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
1.05.02.1.03.0007 - Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum				120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00	

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)		1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	
1.05.02.1.03.0008 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum				70.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)		1	70.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				584.000.000,00		1.810.000.000,00		1.810.000.000,00		1.810.000.000,00		1.810.000.000,00	
Meningkatnya Pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)		28,57	584.000.000,00	42,86	1.810.000.000,00	57,14	1.810.000.000,00	71,43	1.810.000.000,00	85,71	1.810.000.000,00	1.05.0.00.0.00.05.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran				544.000.000,00		1.710.000.000,00		1.710.000.000,00		1.710.000.000,00		1.710.000.000,00	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran (Orang)	0	40	544.000.000,00	40	1.710.000.000,00	40	1.710.000.000,00	40	1.710.000.000,00	40	1.710.000.000,00	
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan,	0	1		1		1		1		1		

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)												
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal (Dokumen)	0	1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal (Dokumen)	0	1		1		1		1				
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	0	0		0		0		0				
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (laporan)	N/A	1		1		1		1				
	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat	0	1		5		5		5				

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)												
1.05.04.1.01.0002 - Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal (Dokumen)	0	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
1.05.04.1.01.0004 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				30.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)	0	1	30.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
1.05.04.1.01.0013 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
1.05.04.1.01.0019 - Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran				50.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00	

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Dokumen Pemutakhiran Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal (Dokumen)	0	1	50.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	
1.05.04.1.01.0021 - Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota				39.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00	
Terlaksananya Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (laporan)	N/A	1	39.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	
1.05.04.1.01.0022 - Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran				100.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00	
Tersedianya Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal (Dokumen)	0	1	100.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	
1.05.04.1.01.0023 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota				100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	
1.05.04.1.01.0024 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kebakaran													
Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Melalui Media Sosial, Wahana Multi Media Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Dokumen)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
1.05.04.1.01.0027 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				50.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	0	1	50.000.000,00	5	900.000.000,00	5	900.000.000,00	5	900.000.000,00	5	900.000.000,00	
1.05.04.1.01.0039 - Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran				75.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran (Orang)	0	40	75.000.000,00	40	100.000.000,00	40	100.000.000,00	40	100.000.000,00	40	100.000.000,00	
1.05.04.1.02 - Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				40.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Laporan)	0	1	40.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
	Jumlah Dokumen SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Laporan)	0	1		1		1		1		1		
1.05.04.1.02.0002 - Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				15.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	
Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Laporan)	0	1	15.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	
1.05.04.1.02.0004 - Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				15.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Laporan)	0	1	15.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	
1.05.04.1.02.0005 - Penyusunan SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				10.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Tersusunnya SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	10.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	

4.1.2. Uraian Sub kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Tahun 2025–2029 dirancang secara strategis untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029. Dukungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran terhadap program prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)
1.	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
			1.05.02.1.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
			1.05.02.1.01.0011 - Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP
			1.05.02.1.01.0012 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi
			1.05.02.1.01.0014 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
			1.05.02.1.01.0015 - Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
			1.05.02.1.01.0020 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
			1.05.02.1.01.0021 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
			1.05.02.1.01.0022 - Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat

**Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)
			1.05.02.1.01.0023 - Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi
			1.05.02.1.01.0024 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja
			1.05.02.1.01.0025 - Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
			1.05.02.1.01.0029 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum
			1.05.02.1.01.0030 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat
			1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
			1.05.02.1.02.0002 - Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
			1.05.02.1.02.0009 - Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah
			1.05.02.1.02.0010 - Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
			1.05.02.1.02.0011 - Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum
			1.05.02.1.02.0012 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
			1.05.02.1.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
			1.05.02.1.03.0004 - Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah
			1.05.02.1.03.0005 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS
			1.05.02.1.03.0007 - Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum
			1.05.02.1.03.0008 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum

4.2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang diseleksi secara strategis dari indikator dan tujuan yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran. Renstra sendiri berisi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun. Dari keseluruhan indikator dan tujuan tersebut, IKU dipilih sebagai tolok ukur utama untuk menilai pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran terhadap target pembangunan yang telah ditetapkan.

Pemilihan IKU dilakukan berdasarkan tingkat relevansi terhadap tujuan strategis, keterukuran secara kuantitatif maupun kualitatif, ketersediaan data, serta kemampuan indikator tersebut dalam merepresentasikan kinerja secara menyeluruh. IKU daerah yang telah ditetapkan kemudian menjadi dasar dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, seperti Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah (PK), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran selama periode RPJMD ini. Dengan demikian, IKU berperan penting dalam menjamin keselarasan antara perencanaan pembangunan daerah dan pencapaian kinerja organisasi.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1.	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Indeks	69,69	72,45	75,54	77,13	78,64	81,89	84,17
2.	Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)	Indeks	27,09	28,49	42,97	51,60	60,40	63,17	66,91
3.	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Indeks	83,00	83,00	86,86	90,71	92,86	93,57	95,71

4.3. Indikator Kinerja Kunci

Indikator kinerja daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah khususnya urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau selama Tahun 2025-2030, yang merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan ketentraman dan ketertiban umum.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2030 tertuang pada tabel berikut.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Urusan Ketentraman dan Keteriban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	03	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1.	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Persentase		14,29	28,57	42,86	57,14	71,43	85,71
2.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
3.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100
4.	Persentase anggota Satlinmas yang telah ditingkatkan kapasitasnya	%	1,62	2,17	2,71	3,25	3,79	4,33	4,87
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,06	84,43	84,71	85,10	85,36	86,31	86,52
6.	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	78,16	77,61	79,19	80,88	82,35	84,12	85,26
7.	Persentase SDM aparatur satpol PP yang ditingkatkan kompetensinya	%	57,73	64,55	71,36	79,55	89,55	93,18	100,00

BAB V

PENUTUP

5.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Tahun 2025–2029 adalah selama lima tahun yaitu dari tahun 2026 sampai 2030. Program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2030 merupakan bagian untuk menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah, sebagai pedoman untuk penyusunan rencana kerja tahun 2030.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Tahun 2025–2029 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Tahun 2025–2029 agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Tahun 2025–2029 dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Tahun 2025–2030 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2026 hingga tahun 2030. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.

5.3. Pedoman Pengendalian dan Evaluasi

Beberapa pedoman dalam pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Tahun 2025–2029 sebagai berikut:

1. Pengendalian risiko strategis perangkat daerah perlu dilakukan secara berkesinambungan dan partisipatif untuk menjamin tercapainya tujuan

dan sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran. Pengendalian risiko dilaksanakan melalui identifikasi risiko, penilaian risiko, penyusunan rencana tindak pengendalian, pemantauan dan evaluasi pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

2. Untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah dan target-target kinerja Renstra, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra minimal 1 kali dalam lima tahun.
3. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional, provinsi, dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Tahun 2025–2029 sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.